



Waduk Keuliling Nangroe Aceh Darussalam

air

MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR

- **Penyediaan Air Baku Dalam Mencapai Target MDG's**
- **Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat**



JANUARI-FEBRUARI 2012

TERWUJUDNYA KEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR YANG BERKELANJUTAN

Pembina
Djoko Kirmanto
Mochammad Amron • Sugiyanto •
Mudjiadi • Djajamurni Warga Dalam
• Pitoyo Subandrio
• Imam Agus Nugroho
• Hartanto

Penanggung Jawab
Leonarda Ibnu Said

Pemimpin Umum
Ardhyta Agus Setiawan

Pemimpin Redaksi
Tine Rosdiana

Redaksi
Trinanda S. P. S.
• Kety Fillaily • Eny Sumariyati

Kontributor
Emir Faridz • Sukorahardjo

Desain/Layout
M. Syaukani • Noorcholis

TU/Sekretaris
Isbandiyah

Data
Nurullia Anjani • Marsono

Foto/Dokumentasi
M. Syaukani • M. Kurdi
• Sri Bagus Herutomo

Sirkulasi
Subbag TU Bina Program

Alamat Redaksi/TU
Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Gedung Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Telp. (021) 7396616 pes. 515
Fax. (021) 7210395
e-mail: humassda@yahoo.com
humassda@gmail.com

Diterbitkan oleh
Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum



EDITORIAL

Selamat tahun baru 2012. Sebagai awal perjalanan di tahun 2012, tim majalah air akan terus berupaya melakukan perbaikan dan perubahan agar selalu dapat menyebarluaskan informasi kegiatan bidang sumber daya air secara menyeluruh dengan . Sebagai awal kami akan mengangkat kesiapan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam melaksanakan program pada tahun 2012.

Sebagai pembuka tahun 2012 majalah AIR memuat Penyusunan program dan sinkronisasi program merupakan langkah awal dalam penyusunan kegiatan, dimana dilakukan evaluasi program, penyesuaian, hingga penajaman kegiatan-kegiatan yang sekiranya perlu dijadikan prioritas untuk masuk dalam penganggaran 2012. Dalam proses penganggaran kegiatan bidang sumber daya air, memperhatikan siklus RKA-KL dan review pelaksanaan penyusunan anggaran tahun 2012.

Tantangan yang dihadapi akan semakin berat dan bervariasi dimasa yang akan datang. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, kebutuhan pangan yang semakin beragam, perubahan iklim dan lain sebagainya adalah realita yang kita hadapi dan berhubungan langsung dengan tugas-tugas bidang sumber daya air. Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi program dan kegiatan Operasi dan

Pemeliharaan bidang sumber daya air akan kami ulas dalam edisi kali ini, begitu juga dengan kegiatan penyusunan RKP bidang sumber daya air, selain itu juga akan disajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam awal bulan ini.

Menyebarkan informasi merupakan bagian dari semangat kami, namun demikian perlu dukungan semua pihak. Kami akan terus bersemangat menyajikan informasi-informasi dengan rasa yang berbeda demi kemajuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.



Waduk Kedung Ombo, Grobogan, Jateng



LAPORAN UTAMA PENGUKUHAN ANGGOTA KNI-ICID

International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) didirikan pada tahun 1950 saat ini telah beranggotakan sekitar 125 negara dan merupakan salah satu organisasi profesi yang paling aktif di dunia dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengelolaan air dan lahan secara optimal dalam rangka pengembangan sistem pertanian beririgasi yang terpadu dengan pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir.



LAPORAN UTAMA PENYEDIAAN AIR BAKU DALAM MENCAPAI TARGET MDG's

Berdasarkan data dari Bappenas tahun 2009 total potensi air di Indonesia 2,7 trilyun m³/tahun yang berarti seperlima dari jumlah air di dunia dengan rincian air permukaan 2,7 trilyun m³/thn dan air tanah 2,6 milyar m³/thn dan yang telah dikelola sebesar 691 milyar m³/thn. Ketersediaan air tersebut tersebar di berbagai pulau dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda.



LAPORAN UTAMA BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertekad untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal penyerapan anggaran di tahun 2012 ini. Apalagi, tahun ini Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran terbesar di antara seluruh kementerian/lembaga (K/L), yakni sebesar Rp 62,56 triliun.



LAPORAN KHUSUS KINERJA PENGELOLAAN SDA HARUS TERUS DITINGKATKAN

Kinerja pengelolaan sumber daya air harus terus ditingkatkan, hal ini dikarenakan kita akan menghadapi tantangan perencanaan dan pemrograman yang semakin kompleks. Beberapa isu strategis yang harus diperhatikan diantaranya penanganan konservasi dan rehabilitasi beberapa DAS...



LAPORAN KHUSUS OPERASI DAN PEMELIHARAAN HARUS MENJADI PRIORITAS

Dalam konteks pencapaian millennium development goals (MDGs) 2015, kita pun dituntut untuk mampu menyediakan air baku yang memadai sebagai sumber air bersih dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum. Itulah mengapa pada tahun 2012 ini alokasi dana OP air baku meningkat sekitar 155% dari tahun 2011.



LAPORAN KHUSUS WISMP II DIHARAPKAN DUKUNG KETAHANAN PANGAN

Pemerintah Indonesia mencanangkan program surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 sehingga diharapkan WISMP II dapat memberikan sumbangan secara nyata terhadap pencapaian tersebut melalui peningkatan pengelolaan baik dari sisi teknik irigasi pertanian maupun lembaga serta bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu dari komponen A pengelolaan SDA WS diharapkan dapat mendorong penyelesaian penyusunan pola pengelolaan SDA di beberapa WS.

- LAPORAN UTAMA**
4 Pengukuhan Anggota KNI-ICID
6 Penyediaan Air Baku Dalam Mencapai Target MDG's
8 Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat

- LAPORAN KHUSUS**
11 Kinerja Pengelolaan SDA Harus Terus Ditingkatkan
14 Operasi dan Pemeliharaan Harus Menjadi Prioritas
18 WISMP II Diharapkan Dukung Ketahanan Pangan

- FOKUS**
20 Pencapaian Direktorat Jenderal SDA
22 Perlunya Pembudidayaan Rawa
23 Program WISMP-2 Tanggung Jawab Bersama
26 Air Baku Tingkatkan Tampung Air

- PROFIL BALAI**
28 Balai Wilayah Sungai Bali Penida

- PROFIL INFRASTRUKTUR**
31 Pembangunan Bendung Copong Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional

- PERSPEKTIF**
35 Pelaksanaan OP Yang Baik Menjamin Kelestarian Fungsi dan Infrastruktur SDA
37 Workshop River Information System & Operation and Maintenance

- BERANDA**
39 Mendukung Ketahanan Pangan Dalam Jakarta Food Security Summit

- SERBA-SERBI**
42 Tanda Ribuan dan Desimal



Pengukuhan Anggota KNI-ICID

International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) yang didirikan pada tahun 1950, saat ini telah beranggotakan sekitar 125 negara dan merupakan salah satu organisasi profesi yang paling aktif di dunia serta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengelolaan air dan lahan secara optimal dalam rangka pengembangan sistem pertanian beririgasi yang terpadu dengan pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, ketika membuka acara Pengukuhan Pengurus Komite Nasional Indonesia-ICID Periode 2011-2016, 25 Januari 2012, di Jakarta. Turut dihadiri oleh para pengurus ICID.

“Ruang lingkup ICID dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada bidang irigasi namun meliputi pengembangan sumber daya air secara lebih menyeluruh. Keterlibatan aktif ICID saat ini dalam berbagai kegiatan organisasi dunia telah menjadikan ICID sebagai organisasi dunia yang prestisius di bidang sumber daya air. Dan peran ICID semakin dirasakan penting dalam upaya pengembangan/pengelolaan air bagi kesejahteraan umat manusia,” jelas Djoko Kirmanto.

Mencermati keterlibatan aktif ICID dalam organisasi dunia yang berkaitan dengan SDA dan irigasi pada umumnya, sangat disadari pentingnya keikutsertaan KNI-ICID baik dalam kegiatan di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan internasional.

Djoko Kirmanto berharap agar para anggota KNI-ICID dapat berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintah dalam menangani permasalahan bidang sumber daya air dan dapat melibatkan profesional muda baik yang ada di pusat maupun daerah dalam kegiatan antara lain mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengairan, pertanian, drainase, pengendalian banjir dan berbagai penelitian komprehensif untuk kemakmuran Indonesia.



Kepengurusan KNI-ICID yang dikukuhkan terdiri dari Dewan Kehormatan, dengan anggotanya Suyono Sosrodarsono, KUSDARYONO, Soekadaryanto, Soenarno, Suparmono, Soenarno, Roestam Sjarief. Dewan Pakar terdiri dari Hafied Gany, Basuki Hadimuljono, Effendi Pasandaran, Indreswari Guritno, Syaiful Mahdi, Rizaldi Boer dan Robiyanto Susanto.

Untuk Pembina KNI-ICID yaitu Plt. Direktur Jenderal SDA, Mochammad Amron dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto. Selain itu juga dikukuhkan Dewan Pimpinan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 8 komisi. (anj/krd)



IMPLEMENTASI MODERNISASI IRIGASI INDONESIA

Sebagian daerah irigasi sudah melewati umur ekonomisnya sehingga pengelolaan air irigasi yang efektif dan efisien terlebih lagi dengan periode pembagian air 2 mingguan, sistem informasi dan pengelolaan data secara manual, perintah operasi pintu secara manual, pengukuran air kurang memadai dan sistem pembagian air secara manual.



Hal tersebut disampaikan Plt. Direktur Jenderal SDA, Moch. Amron dalam acara seminar bertajuk “Revitalisasi Pembangunan Irigasi” yang diadakan oleh *International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)*, 25 Januari 2012, di Jakarta.

Menurut Amron, beberapa hal tersebut diatas melatarbelakangi perlunya diadakan **modernisasi irigasi**. untuk mewujudkan sistem pengelolaan irigasi dalam memenuhi tingkat layanan irigasi yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

“tujuan modernisasi irigasi di Indonesia adalah mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani,” jelas Moch. Amron.

Ruang lingkup (pilar) modernisasi irigasi adalah peningkatan keandalan penyediaan air irigasi, perbaikan sarana dan prasarana irigasi, penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi, penguatan institusi pengelola irigasi dan pemberdayaan sumber daya manusia pengelola irigasi.

Lebih lanjut Moch. Amron mengatakan bahwa modernisasi irigasi memiliki beberapa indikator yaitu peningkatan produktivitas air (kg GKG/m³ air), peningkatan tingkat layanan air irigasi (kecepatan, kecukupan, keakuratan), peningkatan efisiensi irigasi, pengurangan biaya OP, peningkatan pengembalian biaya OP (*OP cost recovery*), peningkatan keberlanjutan pembiayaan (*financial sustainability*), berkurangnya perselisihan dan berkurangnya kerusakan lingkungan (*environment degradation*).

“Modernisasi irigasi bukan rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang bersifat fisik semata, tetapi lebih kepada peningkatan pelayanan. Perubahan tersebut meliputi aspek institusi manajerial dan perubahan teknologi yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif dengan pemenuhan layanan secara efektif, efisien dan berkelanjutan,” papar Moch. Amron. (anj/tin)

GLOSSARY

Modernisasi Irigasi adalah upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, melalui peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya manusia.

Penyediaan Air Baku Dalam Mencapai Target MDG's

Berdasarkan data dari Bappenas tahun 2009 total potensi air di Indonesia 2,7 trilyun m³/tahun yang berarti seperlima dari jumlah air di dunia dengan rincian air permukaan 2,7 trilyun m³/thn dan air tanah 2,6 milyar m³/thn dan yang telah dikelola sebesar 691 milyar m³/thn. Ketersediaan air tersebut tersebar di berbagai pulau dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda. Jika ketersediaan di dibandingkan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah, maka dapat dilihat bahwa keseimbangan air di wilayah Kalimantan dan Papua masih relatif aman sedangkan NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Sumatera sudah mendekati kritis, termasuk Jawa dan Bali sudah defisit -69,3 milyar m³/thn. Jadi dimana ketersediaan sebesar 31,6 milyar m³/thn sementara kebutuhan sudah mencapai 100,9 milyar m³/thn.

Hal tersebut dijelaskan oleh Plt. Direktur Jenderal SDA, Moch. Amron, dalam acara Workshop Sinkronisasi Penyediaan Air Baku untuk Air Minum Tahun Anggaran 2012, 1 Februari 2012, di Surabaya, Jawa Timur, yang merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal SDA dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pembangunan prasarana penyediaan air baku dilakukan untuk mendukung komitmen pemerintah dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) khususnya Goal ke-7, yaitu 'Memastikan Kelestarian Lingkungan', dimana target ke-10 adalah mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.

Target tersebut juga mendukung visi ke-21 yang dicanangkan oleh *Water Supply and Sanitation Collaborative Council*, dimana pada tahun 2025 semua orang berhak mendapat kebutuhan dasar air minum. "Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pembangunan tahun 2014 guna mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program antara lain ketahanan pangan dan air", jelasnya.

Moch. Amron menambahkan, hal tersebut tidak terlepas dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat termasuk penyediaan air minum dengan akses aman dan layak bagi masyarakat.



"Oleh karena itu, sinkronisasi program antara Ditjen SDA selaku penyelenggara sumber daya air dan Ditjen Cipta Karya selaku penyelenggara air minum dan unit distribusi pelayanan air minum dan rumah tangga, sangat penting dilakukan", ujarnya.

Dalam paparannya, Moch. Amron menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen SDA berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya salah satunya adalah regionalisasi penyediaan air baku dan air minum di kawasan Bregas (Brebes-Tegal-Slawi) yang saat ini dalam tahap konstruksi. Beliau menambahkan bahwa Ditjen SDA perlu menyusun program-program yang mantap dan berkesinambungan dalam penyediaan air, pengaturan alokasi air dan pelestarian sumber air dengan memperhatikan program-program diskusi lainnya sehingga didapat sinergi yang saling mendukung.

Direktorat Jenderal SDA juga mendukung program MP3EI yaitu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia antara lain transfer air baku cibarat luar, cilaki, cisanggung 800 liter/det, waduk santosa 1400 ltr/det-BBWS Citarum, pembangunan *water conveyance* karian diharapkan 10 ribu ltr/det-BBWS Cidanau Ciujung Cidurian, pembangunan intake dan saluran air baku Mojokerto 100 ltr/det-BBWS brantas, pembangunan intake dan saluran air baku Lamongan 200 ltr/det-BBWS Bengawan Solo, pembangunan intake dan saluran transmisi air baku Palingkau 220 ltr/det-BWS Kalimantan II, pembangunan prasarana air baku di pulau Ambon dan Lease, dan pulau-pulau terselatan Maluku-BWS Maluku.

Moch Amron mengapresiasi kinerja rekan-rekan Ditjen SDA khususnya di wilayah BBWS dan BWS atas pencapaian kegiatan air baku tahun 2011 mengacu pada Inpres No.3/2011, dimana target pembangunan 7,48 m³/detik dapat terealisasi sebesar 8,806 m³/detik dan target rehabilitasi 1,65 m³/detik dapat direalisasikan sebesar 4,740 m³/detik.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana kegiatan dilaksanakan secara bertahap, kali ini sinkronisasi dilakukan secara nasional mencakup Wilayah Barat dan Timur secara serentak. Selain dihadiri oleh pejabat-pejabat Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) dari Ditjen SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya serta Kepala Satker dari Ditjen Cipta Karya, kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari dan turut mengundang seluruh pihak yang berwenang dan berkaitan dengan penyediaan air baku, di antaranya Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Prasarana Permukiman Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Selain pemaparan, kegiatan ini dilanjutkan dengan sinkronisasi program melalui diskusi yang dibagi menjadi beberapa desk. (*ech/tin*)

SINKRONISASI DITJEN SUMBER DAYA AIR DAN DITJEN CIPTA KARYA

Tantangan berat dalam mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015 bidang air minum tidak hanya membutuhkan dana besar, yakni Rp 65,3 Triliun, tapi juga dukungan air baku. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono, dalam Workshop Sinkronisasi Air Baku untuk Air Minum antara Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air, 1 Februari 2012, di Surabaya.

"Ditjen SDA sudah dua tahun lalu mendukung air baku untuk air minum. Namun harus disinkronkan dan dievaluasi, apakah sudah dimanfaatkan melalui program-program Ditjen Cipta. Konflik kepentingan alokasi air baku antara untuk air minum dan irigasi masih sering terjadi. Komitmen Pemda juga kadang menghambat, seperti yang terjadi di Tanjung Pinang, tata ruang dan catchment area rusak karena pembangunannya," kata Budi Yuwono.

Kapasitas air minum yang dibutuhkan sebesar 68.000 Liter /detik untuk mencapai MDGs, sedangkan kebutuhan air baku tambahan hingga 2014 sebanyak 45 m³/detik. Karena itu pengalokasian anggaran BBWS/BWS agar disesuaikan dengan mempertimbangkan fluktuasi kebutuhan dukungan air baku untuk air minum dan percepatan pelayanan air minum bagi masyarakat. Selain itu, harus meningkatkan pembangunan embung-embung sumber air baku secara terpadu untuk penanganan regional desa-desa rawan air. (*ech*)

GLOSSARY

Air Baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.



Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertekad untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal penyerapan anggaran di tahun 2012 ini. Apalagi, tahun ini Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran terbesar di antara seluruh kementerian/lembaga (K/L), yakni sebesar Rp 62,56 triliun. Oleh karena itu, setiap elemen di Kementerian PU, mulai dari level direktorat jenderal (ditjen) hingga satuan kerja (satker) harus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, dari pelaksanaan lelang hingga penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam acara Rapat Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Barat, 6-7 Januari 2012, di Jakarta. Sedangkan untuk Wilayah Timur diselenggarakan pada tanggal 10-11 Januari 2012 di Denpasar, Bali. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PU hingga para kepala balai, satker, maupun dinas PU.

“Raker ini sangat penting untuk evaluasi kinerja tahun 2011 dan untuk rencana peningkatan kualitas program kerja 2012. Kementerian PU merupakan salah satu dari 6 kementerian yang menerima DIPA secara langsung dari Presiden SBY karena dinilai penyerapan kita tahun 2011 lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan merupakan salah satu kementerian yang penyerapannya paling tinggi. Anggaran Kementerian

PU tahun 2012 sebesar 62,5 trilyun. Seperti diketahui penyerapan anggaran Kementerian PU tahun 2011 mencapai 89,05% dari anggaran 56,9 trilyun,” jelas Djoko Kirmanto.

Oleh karena itu diperlukan konsolidasi pada forum raker dengan tujuan mempercepat program tahun 2012 dan melakukan evaluasi kinerja tahun 2011 untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan program tahun 2012. Diharapkan agar evaluasi ini dilakukan secara rinci. Pencapaian kinerja kementerian PU tahun 2011 dari unsur perencanaan dan upaya untuk meningkatkan kualitas program tahun 2012.

Dengan adanya kepercayaan yang besar dari pemerintah dan masyarakat membuat Kementerian PU harus bekerja lebih baik lagi agar semua sasaran atau target kerja tercapai. Kecepatan dan kualitas kerja sangat berpengaruh

dengan hasil kerja yang akan dicapai. Bekerjalah sesuai dengan tugas masing-masing karena dengan begitu tujuan dari kegiatan kita dapat tercapai sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Dijelaskan Menteri PU, raker yang diadakan perlu membahas beberapa hal. Pertama, melakukan evaluasi yang mendalam mengenai penyebab belum efektifnya penyerapan anggaran 2011 serta mengidentifikasi kemungkinan untuk terjadi lagi pada tahun 2012, seperti dana blokir, proyek *multiyears contract*, pinjaman luar negeri, dan lain-lain. Kedua, menyusun rencana pelelangan pekerjaan tahun 2012 yang lebih terukur sehingga dapat dimonitor progresnya guna penyusunan rencana fisik yang lebih memadai agar kegiatan tidak tertumpu pada akhir tahun anggaran.

“Ketiga, melakukan upaya-upaya pemantauan yang lebih efektif dengan memperkuat mekanisme dan disiplin pelaporan dari semua kuasa pengguna anggaran melalui penggunaan e-monitoring. Keempat, melakukan sosialisasi tentang pengaturan pelaksanaan pengadaan konstruksi dan jasa konstruksi serta kualifikasi penyedia jasa konstruksi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri PU No. 09/SE/M/2011 tertanggal 3 Oktober 2011,” lanjut Djoko Kirmanto.

Dengan melihat fakta progres penyerapan dan pelaksanaan pekerjaan fisik 2011 yang masih sedikit di bawah target, diharapkan agar seluruh pihak dapat segera mencermati permasalahan sebenarnya yang dihadapi para satker. Salah satunya adalah percepatan dalam proses pelelangan karena ditengarai waktu yang digunakan untuk lelang relatif masih lama, khususnya dalam melakukan evaluasi lelang oleh Pokja dan ULP, demikian pula untuk proses penyelesaian sengketa dan sengketa banding.

Djoko menginstruksikan kepada seluruh jajaran satminkal Eselon I, para kepala balai, dan para kepala dinas PU provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan para satker di lapangan harus selalu melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus, terutama kegiatan-kegiatan strategis dan kegiatan-kegiatan yang selama ini memiliki *track record* capaian yang rendah.

“Diperlukan pengendalian dan pengawasan yang makin ketat serta tindak turun tangan secara cepat dalam mengatasi keseluruhan permasalahan yang timbul. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi penumpukan anggaran pada akhir tahun yang dikhawatirkan akan berkorelasi kuat dengan menurunnya kualitas pekerjaan atau mutu konstruksi infrastruktur PU,” tegasnya.

Menteri PU juga memberikan instruksi terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja. Menurutnya, setiap kasatker (baik di pusat maupun di daerah) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PP No. 6 Tahun 2006 jo. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

“Pelaporan ini harus disampaikan dengan tepat waktu dan benar guna mendukung kesiapan kita untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Kementerian PU tahun 2012,” kata Djoko.

Kuasa Pengguna Anggaran juga harus membuat Laporan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2006 yang disusun dari laporan progres fisik dan keuangan sebagaimana dilakukan melalui *e-monitoring* Kementerian PU. Selain itu, sesuai dengan tugas institusional Kementerian PU, semua satker diharuskan untuk membuat Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan LAKIP Kementerian PU.

Mengenai fenomena bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah (antara lain Solo, Brebes, dan Nusa Tenggara Timur), Menteri PU menginstruksikan kepada semua kepala balai, kasatker, dan PPK di lapangan agar mengantisipasi meluasnya bencana dengan segera melakukan pemeriksaan ulang semua bangunan pengaman, pengendali banjir, saluran, dan drainase guna memastikan apakah bangunan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kemudian, segera lakukan pengecekan kondisi infrastruktur PU yang mungkin terkena oleh dampak banjir, seperti jalan, jembatan, bendung, waduk, embung, dan lain sebagainya, guna dilakukan tindakan preventif. Peralatan berat dan para pelaksana lapangan harus disiagakan penuh di daerah-daerah rawan bencana, agar sewaktu-waktu bisa dikerahkan jika terjadi kondisi darurat,” jelasnya.

Program prioritas Kementerian PU tahun anggaran 2012 tidak lepas dari prioritas nasional, seperti program swasembada surplus beras 10 juta ton di tahun 2014, Kementerian PU akan memperkuat dukungan, khususnya terkait dengan kesiapan daerah irigasi baik upaya pemeliharaan, rehabilitasi dan dukungan terhadap Kementerian Pertanian untuk perluasan area pertanian.



“Saya meminta agar semua personil bidang ke-pu-an, sesuai dengan motto Kementerian PU bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat, dapat bekerja lebih keras dan lebih baik lagi karena pengalaman tahun 2011 dapat dijadikan pelajaran bagi

kita untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan program bidang ke-pu-an,” jelas Djoko Kirmanto.

Di tahun 2012, Kementerian PU mengalokasikan dana sekitar Rp 20 triliun untuk membangun infrastruktur

di kawasan Indonesia Timur. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan pembangunan di Timur Indonesia, antara lain Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku, dan Papua. *(enc/anj)*

SILPA SALAH SATU SUMBER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN

Kementerian Keuangan mencatat dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2011 mencapai Rp 39,2 triliun. Dana sisa lebih perhitungan anggaran tersebut didapat dari sisa penyerapan anggaran seluruh kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 129,3 triliun pada 2011 dan defisit anggaran berkisar Rp 90,1 triliun. Dan akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan tahun 2012 antara lain untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum menyerap dana SILPA sebesar Rp 3,9 triliun dengan syarat harus sudah diterima paling lambat pertengahan tahun 2012.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, pada Rapat Kerja Kementerian PU Wilayah Timur, 10 Januari 2012, di Denpasar, Bali. Turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Moch. Amron, Sekretaris Jenderal Agoes Widjanarko, Irjen PU Basoeki Hadimoeljono dan pejabat lain di lingkungan PU. Serta Gubernur Bali, para Kasatker, Kabalai, Kadinan PU dan perwakilan dari daerah Timur Indonesia.

Djoko belum dapat memastikan jumlah dana SILPA yang akan digunakan Kementerian PU untuk pembangunan infrastruktur. “Saya belum mengetahui besaran jumlah dana yang akan diterima. Jika Kementerian PU diberi dalam jumlah besar, kemungkinan akan ditolak karena khawatir sulit diserap. Apalagi jika diberikan bulan Oktober–November,” tegas Djoko Kirmanto.

Ditambahkannya, jika dana SILPA bisa diterima pada awal atau pertengahan tahun 2012 akan lebih mudah untuk diserap. Dana tersebut dapat menjadi dana tambahan selain APBN 2012. Penerimaan dana SILPA pada awal tahun dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dengan waktu yang ditentukan dan hasil yang maksimal.

Dalam Raker tersebut, Menteri PU menjelaskan bahwa APBN 2012 sebesar Rp 62,56 triliun, sekitar 96,26% (Rp 60,22 triliun) dialokasikan untuk tiga direktorat jenderal. Yakni, Ditjen Sumber Daya Air Rp 16,44 triliun (26,3%), Ditjen Bina Marga Rp 30,95 triliun (49,5%) dan Ditjen Cipta Karya Rp 12,83 triliun (20,5%). Dengan demikian, progres penyerapan dan pelaksanaan fisik ketiga direktorat jenderal tersebut sangat menentukan total progres keseluruhan Kementerian PU. *(ard)*



Kinerja Pengelolaan SDA Harus Terus Ditingkatkan

Kinerja pengelolaan sumber daya air harus terus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kita akan menghadapi tantangan perencanaan dan pemrograman yang semakin kompleks. Beberapa isu strategis yang harus diperhatikan diantaranya penanganan konservasi dan rehabilitasi beberapa DAS, dukungan terhadap surplus beras 10 juta ton beras, penyediaan air baku terkait pencapaian MDGs, pengendalian banjir kota-kota besar dan metropolitan, pengendalian lahar dingin dan erosi pasca letusan gunung berapi dan pengamanan kawasan dari dampak abrasi pantai dan rob.

Hal tersebut dijelaskan oleh Plt. Dirjen Sumber Daya Air, Moch. Amron dalam acara Lokakarya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air TA 2013 untuk Wilayah Barat, 16 Februari 2012, di Solo, Jawa Tengah, setelah sebelumnya untuk wilayah Timur pada 13 Februari 2012, di Jakarta.

“Dengan PAGU 16 triliyun pada tahun 2012, saya mengharapkan kinerja pengelolaan sumber daya air akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan usulan program untuk tahun 2013 kiranya dapat fokus kepada prioritas program mendesak” jelas Amron.

Perencanaan dan pemrograman bidang sumber daya air untuk Inisiatif baru agar fokus kepada pembangunan tampungan air dan prasarana air baku diluar sasaran RPJMN 2010-2014 terutama yang mendukung 6 Koridor Ekonomi MP3EI, penyiapan pembangunan tampungan-tampungan air skala besar terutama di luar Jawa, rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah yang strategis bagi produksi padi Nasional, integrated flood management untuk mengamankan pusat-pusat pertumbuhan pada 6 Koridor Ekonomi MP3EI, serta penanganan bencana.

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang memiliki dampak menyeluruh dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Dibutuhkan adanya perubahan yang bersifat fundamental mulai terbentuknya sistem nilai baru hingga pelaksanaan rencana aksi untuk masing-masing area perubahan menuju kondisi ideal dari kondisi aktual terkait dengan aspek-aspek organisasi, tatalaksana, pengelolaan SDM, pengawasan akuntabilitas dan pelayanan publik.

“Pengelolaan program reformasi birokrasi secara menyeluruh sangatlah penting, karena pengelolaan tidak hanya dilakukan terhadap program-program pada setiap area perubahan namun juga pengelolaan dari sisi manusia sebagai pelaksana dari perubahan itu sendiri,” jelas Moch. Amron.

Pengelolaan yang menyeluruh mencakup 3 aspek yaitu kepemimpinan, yang berkaitan dengan keputusan, arahan, tindakan dan komitmen; manajemen aktivitas berkaitan dengan pengelolaan aktivitas secara fundamental (sisi teknis perubahan) agar tepat waktu, tepat mutu dan tepat budget dan manajemen perubahan berkaitan dengan pengelolaan orang-orang yang terlibat dalam perubahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (sisi manusia dari perubahan).

Moch. Amron melanjutkan bahwa ketiga aspek tersebut harus dikelola secara seimbang dan terpadu. Ketiadaan salah satu aspek diatas akan menjadikan reformasi birokrasi menjadi tidak seimbang dan akhirnya tidak berlanjut.

Untuk itu Moch. Amron berharap agar segenap jajaran Ditjen SDA akan berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan reformasi birokrasi, berkomitmen terhadap tim dan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai tupoksi dan mandate yang diberikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. *(ard/anj)*



BALAI PENGELOLA WILAYAH SUNGAI

Pelantikan dan pengambilan sumpah bukanlah sekedar acara seremonial tetapi merupakan sebuah penegasan akan komitmen yaitu komitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan profesional. Hal ini bukan hanya didorong oleh upaya reformasi internal tetapi besarnya harapan dan tuntutan akan aparat pelaksana pemerintahan yang operasional, akuntabel, bersih dan berwibawa.

“Peran pejabat struktural eselon IV dan pejabat inti satuan kerja dalam struktur organisasi pemerintahan merupakan ujung tombak dari seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya air baik yang bersifat fisik dan non fisik, dan diharapkan harus mampu menguasai kemampuan manajerial (administrasi dan manajemen) dan kemampuan teknis operasional, yang didukung dengan penguasaan sistem, tata cara dan prosedur kerja yang secara normative sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku,” jelas Moch. Amron pada pelantikan pejabat satuan kerja di lingkungan Ditjen SDA untuk wilayah timur, 13 Februari 2012, di Jakarta dan wilayah barat, 16 Februari 2012 di Solo.

Para pejabat eselon IV dan pejabat inti satuan kerja harus dapat mengakselerasi proses aktivitas roda organisasi agar dapat berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan berkoordinasi optimal di daerah atau di lapangan dengan pemerintah daerah.

Dengan telah dibentuknya balai/balai besar wilayah sungai tahun 2006 dan secara efektif dimulai pada tahun anggaran 2007, tugas balai adalah sebagai pengelola sumber daya air di wilayah sungai dan tidak hanya berupa pekerjaan fisik atau pembangunan infrastruktur. Kegiatan pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan dengan benar akan melahirkan kegiatan yang berupa kegiatan fisik dan non fisik yang saling berkaitan sehingga infrastruktur yang dibangun di samping bermanfaat juga akan sustainable atau berkelanjutan.

Mengingat pentingnya tugas pengelolaan di lapangan, Moch. Amron mengingatkan agar seluruh pejabat inti satker yang banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan di lapangan agar selalu berkoordinasi sepenuhnya dengan semua personil yang ada di struktur balai sehingga kegiatan yang dilaksanakan dilapangan akan selalu merupakan bagian dari program balai secara keseluruhan.

Pelantikan pejabat pimpinan eselon IV dan pejabat inti satuan kerja dihadiri oleh Para pejabat eselon II dilingkungan Ditjen Sumber Daya Air, para kepala Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai serta para undangan.

Adapun pejabat yang dilantik untuk wilayah timur antara lain Constandji Nait, SP, MT sebagai PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA BWS Nusa Tenggara II, Ali Cahyadi Achmad, ST, MT sebagai PPK Perencanaan dan Program BWS Maluku Utara dan Dave Harold Irhajdi M, ST, M.Eng. Sc sebagai PPK Perencanaan dan Program BWS Sulawesi II.

Sedangkan pejabat yang dilantik untuk wilayah barat antara lain Ir. Budi Priyanto, Sp.1, Kepala SNVT PJSA BBWS Pemali Juana, Indah Kusuma Hidayati, ST, MT PPK Irigasi I BBWS Brantas, dan Dani Hamdan, ST, M.Sc PPK Perencanaan dan Program BBWS Citarum. *(ardi/tin)*

GLOSSARY

Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah Kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Operasi dan Pemeliharaan Harus Menjadi Prioritas

Dalam konteks pencapaian *millennium development goals* (MDGs) 2015, kita pun dituntut untuk mampu menyediakan air baku yang memadai sebagai sumber air bersih dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum. Itulah mengapa pada tahun 2012 ini alokasi dana OP air baku meningkat sekitar 155% dari tahun 2011. Hal ini dimaksudkan agar OP air baku dapat terselenggara lebih efektif antara lain untuk mendukung program tersebut yaitu mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat pada tahun 2015.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Hartanto, dalam acara Sinkronisasi Program Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air untuk Bagian Barat, 25 Januari 2012, di Batam, Kepulauan Riau. Turut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV. Sedangkan untuk bagian Timur diadakan 1 Februari 2012 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Tantangan yang akan kita hadapi semakin berat dan bervariasi di masa yang akan datang. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, kebutuhan pangan yang semakin beragam, perubahan iklim adalah realita yang kita hadapi dan berhubungan langsung dengan tugas kita.

Untuk itu kegiatan sinkronisasi OP merupakan langkah awal dalam penyusunan rencana kegiatan OP SDA. Dalam kegiatan ini dilakukan penyalarsan dan penajaman program kegiatan OP SDA dengan memperhatikan berbagai kebijakan dan aturan terkait serta keterlibatan pelaksana di lapangan yaitu Balai dan SKPD.

"Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi program kegiatan di masing-masing balai besar/balai wilayah sungai dan SKPD dinas provinsi yang telah dilaksanakan tahun 2011, mengkaji persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2012 dan menyusun usulan kegiatan OP SDA tahun 2013. Saya berharap kegiatan yang akan disusun semakin fokus, tidak tumpang tindih, saling melengkapi, terpadu dan berkesinambungan," jelas Hartanto.

Dalam penyusunan rencana, acuan kita adalah Rencana Strategis Kementerian PU 2010–2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.23/PRT/M/2010. Renstra adalah dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 tahun serta mencantumkan target *output* dan *outcome* OP SDA yang akan dicapai dalam 5 tahun yaitu 2010–2014.

Dalam penyusunan rencana, kita memerlukan data yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk itu diharapkan kepada kepala balai dan satker penerima dana TP-OP untuk melakukan *update* data inventarisasi kondisi sarana/prasarana SDA yang ada di wilayah kerjanya termasuk perkiraan angka kebutuhan biaya OP (AKNOP). Karena data yang terkumpul hanya 36% balai dan 63% SKPD yang merespon data inventarisasi kondisi sarana/prasarana SDA dan 42% balai dan 81% SKPD yang merespon data AKNOP, maka diharapkan sisanya akan dapat mengumpulkan data-data terkait secepatnya.

Berkaitan dengan kebutuhan pangan, pemerintah telah mencanangkan program ketahanan pangan atau swasebada berkelanjutan dengan target produksi pada tahun 2014 sebesar 81,7 juta ton GKG atau surplus 10 juta ton beras dan Inpres Nomor 5 tahun 2011 tentang pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim.

Dengan adanya laju perubahan pemanfaatan lahan pertanian yang kurang terkendali, maka penambahan luas lahan pertanian akan menghadapi banyak kendala. Maka salah satu cara yang paling rasional adalah mengoptimalkan produktivitas lahan yang ada dengan dukungan operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi/rawa/tambak. Kita dituntut untuk menunjukkan peran dan kapasitas kita sebagai penyedia infrastruktur yang handal dalam mendukung program ketahanan pangan.

Dengan adanya perubahan iklim dan ketidakseimbangan hidrologi yang menyebabkan musim kering lebih panjang sementara musim hujan lebih pendek dengan intensitas curah hujan yang lebih besar sehingga menimbulkan banjir,

kekeringan, tanah longsor, abrasi pantai, banjir lahar dan sedimen.

Maka OP sarana/prasarana SDA dan penanggulangan bencana yang dilakukan secara tepat sasaran dapat mengantisipasi dan meminimalkan dampak yang terjadi akibat daya rusak air. OP sarana/prasarana SDA dan penanggulanga bencana juga diharapkan mampu mendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang terus meningkat dari waktu ke waktu melalui kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. *(ech/anj)*



OPERASI DAN PEMELIHARAAN KEMBALIKAN FUNGSI LAYANAN INFRASTRUKTUR



Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Pembentukan direktorat ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian kita terhadap sarana dan prasarana SDA yang telah dibangun agar tetap berfungsi sesuai umur rencana.

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, penyelenggaraan jaminan mutu, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan darurat akibat bencana.

Kegiatan operasi dan pemeliharaan khususnya bidang sumber daya air dilakukan untuk mengembalikan fungsi layanan infrastruktur, agar infrastruktur yang telah terbangun tetap berfungsi sesuai dengan umur rencana layanan. Cakupan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya

air mencakup kegiatan operasi dan pemeliharaan seluruh infrastruktur bidang sumber daya air, seperti prasarana irigasi, bendungan, situ, embung, pengendali sedimen, pengendali banjir, hingga bangunan pengamanan pantai. Untuk itulah dibutuhkan ketersediaan dan pemutakhiran data-data infrastruktur, sebagai dasar pengelolaan operasi dan pemeliharaan ke depan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Hartanto, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air dalam wawancara dengan Majalah Air, 26 Januari 2012, di Batam, Kepulauan Riau.

“Tugas yang dibebankan kepada direktorat ini dapat dicapai jika terjalin kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik antar elemen di tingkat kementerian maupun Bali dan SKPD di daerah sehingga tercipta sinergitas penyelenggaraan OP SDA yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan OP SDA yang diharapkan yaitu terjanya fungsi infrastruktur untuk mendukung mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan,” jelas Hartanto

Dalam hal pengumpulan data, diwajibkan kepada balai wilayah sungai untuk melakukan audit teknis terhadap infrastruktur sumber daya air di wilayahnya, termasuk melakukan walkthrough, dan melakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP), dan dari AKNOP itulah kemudian akan dijadikan acuan dalam penganggaran operasi dan pemeliharaan.

Lebih lanjut Hartanto mengatakan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, mengoptimalkan aset infrastruktur yang ada, sehingga kegiatannya lebih kepada menjaga dan memelihara agar infrastruktur yang telah terbangun dapat berfungsi sesuai umur rencana. Operasi dan pemeliharaan harus menjadi prioritas. Kendala yang dihadapi saat ini dalam operasi dan pemeliharaan adalah keterbatasan anggaran yang ada, pada tahun 2011, anggaran untuk operasi dan pemeliharaan sebesar 1,3 triliun rupiah, dan dari total anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air masih dirasa belum mencukupi.

“Dengan cakupan kegiatan operasi dan pemeliharaan yang luas, dan dengan anggaran yang ada, dirasakan masih belum mencukupi, namun kita tetap bekerja keras agar operasi dan pemeliharaan tetap terjaga” tegas Hartanto

Rencana ke depan, melalui sinkronisasi program dan kegiatan operasi dan pemeliharaan, akan disusun secara sistematis mengenai data prasarana sumber daya air yang perlu dilakukan operasi dan pemeliharannya, sehingga infrastruktur sumber daya air tetap terjaga fungsinya. (ard)



Kepulauan Riau merupakan kepulauan yang berkembang menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, dampak dari *free trade zone*. Perkembangan kawasan tersebut mendorong tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, yaitu sekitar 10% kenaikan pertumbuhan penduduk pertahunnya. Hal ini mendorong peningkatan kebutuhan akan pemenuhan air untuk domestik, *municipal* dan industri. Maka solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan penyediaan air baku. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Sumatera IV, Tris Raditian, di Batam.

Balai Wilayah Sungai Sumatera IV yang berada di Provinsi Kepulauan Riau mengelola lima wilayah sungai, yaitu Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan, Wilayah Sungai Kepulauan Lingga, Wilayah Sungai Kepulauan Karimun, Wilayah Sungai Kepulauan Natuna, dan Wilayah Sungai Kepulauan Anambas. Dengan curah hujan yang relatif tinggi (2000 mm–3000 mm per tahun), lahan dan *quarry* yang tersedia untuk pembangunan bendungan, sekaligus potensi menjanjikan untuk dibangunnya waduk muara (*estuary dam*) ternyata tidak memiliki Cekungan Air Tanah, sehingga sumber air dan penyediaan air untuk masyarakat mengandalkan air permukaan.

“Penyediaan air baku mutlak diperlukan, karena selain wilayah kepulauan riau tidak memiliki cekungan air tanah, pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan air. Sampai saat ini, misalnya untuk kepulauan Bintan suplai air baku dengan WTP terpasang sebesar 498 liter/detik, sementara kebutuhan air baku yang diperlukan sebesar 966 liter/detik, sehingga masih defisit 468 liter/detik” jelas Tris Raditian

Pada tahun 2011, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV telah merealisasikan program-program kegiatan yang terkait dengan penyediaan air baku, yaitu penyediaan air baku Tanjung Uban, peningkatan tampungan air baku Sei Pulai, dan pembangunan embung Pulau Dompak.

“Pada tahun 2012 kami merencanakan pembangunan konstruksi untuk pembangunan tampungan air baku Sei Gesek, dan peningkatan tampungan air baku kolong enam di Tanjung Pinang. Meskipun kendala yang dihadapi adalah pembebasan lahan, tapi kami terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan” lanjut Tris raditian.

Selain penyediaan air baku, pembangunan bangunan pengamanan pantai pun menjadi perhatian, hal ini dikarenakan sangat terkait dengan kawasan perbatasan yang berhubungan dengan pertahanan negara. (ard/tin)



PENYEDIAAN AIR BAKU PRIORITAS PROGRAM BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA IV

GLOSSARY

Bendungan adalah Setiap penahan buatan, jenis urugan atau jenis lainnya, yang menampung air atau dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Cekungan air tanah adalah Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Embung/Waduk Lapangan adalah Tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.



WISMP II Diharapkan Dukung Ketahanan Pangan

Pemerintah Indonesia mencanangkan program surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 sehingga diharapkan WISMP II dapat memberikan sumbangan secara nyata terhadap pencapaian tersebut melalui peningkatan pengelolaan baik dari sisi teknik irigasi pertanian maupun lembaga serta bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu dari komponen A pengelolaan SDA WS diharapkan dapat mendorong penyelesaian penyusunan pola pengelolaan SDA di beberapa WS.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Program Ditjen SDA, Mudjadi, dalam acara *Workshop* Persiapan Pelaksanaan Program Loan WISMP II 8027-ID, 7 Februari 2012, di Jakarta. Turut dihadiri oleh Direktur Bina Program SDA, Direktur Bina OP SDA, Bappenas, World Bank, Kementerian Pertanian dan Kepala Dinas Pengairan NAD. *Workshop* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal bahwa dengan WISMP II bagi para pengambil keputusan, utusan dan pelaksana di daerah.

Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) II merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan produksi hasil pertanian melalui penyempurnaan sistem pengaturan, pengelolaan

kelembagaan, keberlanjutan fiskal, pengelolaan dan kinerja dalam pengelolaan sumber daya air. Dan pengelolaannya sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang SDA dan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas fisik dan ekonomi pertanian. Program ini merupakan program lanjutan dari program WISMP I yang telah berakhir pada bulan Desember 2010.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani program WISMP II 8027-ID pada tanggal 6 Oktober 2011 dan telah berlaku efektif 14 November 2011 yang akan berlangsung selama 5 tahun (2011–2016), dan merupakan hasil kerjasama dengan World Bank dengan dana sebesar 150 juta USD.

Komponen program WISMP II terdiri dari Komponen A- Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Komponen B-Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, Komponen C-Peningkatan Pengelolaan Irigasi Jatiluhur dan komponen D-Manajemen Proyek dan Dukungan terhadap Implementasi.

Menurut Direktur Bina Program SDA, Mudjadi, program WISMP II mempunyai sedikit perbedaan dengan WISMP I. Perbedaannya terletak pada mekanisme penganggaran. Pada WISMP I mekanisme penyaluran dana pemerintah kepada pemerintah daerah melalui penganggaran dengan menggunakan mata anggaran masing-masing kementerian.

“Sedangkan pada WISMP II penyaluran dana dari pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan dengan mekanisme penerusan pinjaman pemerintah sebagai hibah kepada pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 168 tahun 2008 tentang Hibah Negara. Hal ini berarti pemerintah daerah akan menerima hibah dari pemerintah dan dipergunakan untuk program WISMP II,” jelas Mudjadi

Sementara itu, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas, Donny Azdan, mengatakan *loan agreement program* WISMP II merupakan kesepakatan antara bank dunia

dengan pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian dilahan beririgasi.

“Dengan berbagai pengalaman yang diperoleh pada pelaksanaan WISMP I diharapkan pelaksanaan dan hasil WISMP II akan jauh lebih baik dari aspek output dan outcome. Namun kita masih harus terus belajar dalam pelaksanaan WISMP II khususnya dalam penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,” ungkap Donny Azdan.*(anj/tin)*



Pencapaian Direktorat Jenderal SDA



Pada tahun 2010 dengan PAGU sebesar 9,55 trilyun progress keuangan Ditjen SDA sebesar 78,46% atau sebesar 7,49 trilyun dengan progress fisik sebesar 87,55%. Sedangkan pada tahun 2011 dengan PAGU sebesar 13,02 trilyun progress keuangan Ditjen SDA sebesar 85,71% atau sebesar 11,16 trilyun dengan progress fisik sebesar 89,90%. Ini berarti terjadi kenaikan kinerja penyerapan keuangan dan pelaksanaan fisik, dimana peningkatan kinerja penyerapan keuangan meningkat sebesar 7,25% dan progress fisik meningkat sebesar 2,35%. Hal ini didukung dengan kenaikan PAGU anggaran sebesar 3,46 trilyun.



Hal tersebut diungkapkan Plt. Direktur Jenderal SDA, Moch. Amron, pada acara asistensi desk, 6 Januari 2012, yang merupakan rangkaian dari Rapat Kinerja Kementerian PU Tahun 2012 Wilayah Barat. Turut dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat eselon II dilingkungan Ditjen SDA, para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas PU.

Pada tahun anggaran 2012 ini Ditjen SDA mendapatkan alokasi PAGU sebesar 16,44 trilyun atau naik sebesar 3,42 trilyun dari tahun 2011. Apabila kita mengasumsikan peningkatan kinerja secara logika linier, maka pada akhir tahun anggaran 2012 diprediksikan pencapaian kinerja Ditjen SDA dalam penyerapan keuangan sebesar 92,96% dan progress fisik sebesar 93,03%.

Pencapaian kinerja pelaksanaan program Ditjen SDA tahun 2011, penyerapan keuangan sebesar 85,71% dan progress fisik sebesar 89,90%. Penyerapan keuangan sebesar 85,71% tersebut terdiri dari penyerapan dana rupiah murni (RPN) sebesar 88,15% dan dana pinjaman luar negeri (PLN) sebesar 76,81%.

“Dengan komposisi penyerapan yang seperti itu diharapkan agar mencermati penyusunan rencana penyerapan keuangan TA 2012 khususnya untuk paket-paket pekerjaan yang didanai dari pinjaman luar negeri. Dan dari kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2010–2011), penyerapan keuangan untuk kegiatan yang didanai dari PLN mulai menunjukkan kenaikan yaitu dari 67% di tahun 2010 menjadi 76,81% di tahun 2011,” jelas Moch.Amron.



Upaya-upaya Ditjen SDA dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program TA. 2012 adalah melaksanakan penyelesaian pengisian form UKP-4, pembuatan *time line* untuk kegiatan yang masuk dalam *Master Plan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), penyelesaian *Multiyears Contract* untuk pembangunan Jaringan Utama Daerah Irigasi Batang Anai Paket AMS-04 Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat serta Pembangunan Bendungan Pandanduriswangi, memprioritaskan pembangunan jaringan irigasi di luar Pulau Jawa dan memprioritaskan pembangunan di Provinsi Naree Aceh Darusalam, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Lanjut Moch. Amron, salah satu prioritas lainnya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program TA 2012 yaitu melaksanakan pelelangan dini untuk tahun anggaran 2012 segera mungkin dilaksanakan sehingga bulan maret 2012 pelelangan tersebut sudah selesai. *(anj/ens)*





Perlunya Pengembangan Rawa

Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman yang akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis. Topografi Provinsi Kalimantan Barat relatif datar, dicirikan dengan adanya sebagian daerah bergunung di bagian utara dan menjadi semakin mendatar ke arah selatan, dimana pada daerah itu terdapat banyak rawa-rawa.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, Ramdanuddin, ketika melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Kubu Rata Desa Ambawang mendampingi Direktur Bina Program, Mudjadi, beserta rombongan, 3 Februari 2012, di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Fungsi rawa adalah konservasi sumber daya air, mencegah terjadinya banjir dan mencegah intrusi air laut ke dalam air tanah dan sungai. Sebagian wilayah Kalimantan Barat khususnya Pontianak 70 persen adalah rawa. Rawa yang ada di Pontianak sekitar 2 juta ha namun yang dimanfaatkan oleh pihak BWS Kalimantan I sekitar 271 ribu ha," lanjut Ramdanuddin.

Salah satu program dari BWS Kalimantan I untuk tahun 2012 ini memprioritaskan budidaya rawa yang ada di beberapa kabupaten, di antaranya adalah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas. "Rawa yang akan dibudidayakan sekitar ±200 ribu ha dari," kata Ramdanuddin.

Namun tidak semua rawa yang ada di Kalimantan merupakan kewenangan BWS Kalimantan I. Maka dari itu, dalam membudidayakan tidak boleh merubah semua rawa untuk dibudidayakan karena rawa tersebut juga milik dari Kementerian Kehutanan.

Sementara itu Direktur Bina Program, Mudjadi, mengatakan bahwa dalam pembudidayaan rawa semua pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah kegiatan operasi dan pemeliharannya yang harus diperhatikan bersama. *(anj/ech)*



Program WISMP-2 Tanggung Jawab Bersama

Program pengelolaan sumber daya air dan irigasi tahap 2 atau WISMP-2, merupakan lanjutan dari program WISMP APL 1 yang sudah berakhir di akhir Desember 2010. Program WISMP-2 dirancang secara utuh dan terintegrasi untuk menjangkau sasaran secara komprehensif, sehingga aspek-aspek lain yang terkait dalam pengelolaan irigasi juga turut dimasukkan kedalam ruang lingkup program WISMP-2.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Moch. Amron dalam acara *Launching* dan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah Program WISMP-2, 27-28 Februari 2012, di Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Plh. Dirjen Bina

Bangda Kementerian Dalam Negeri, Marwanto Harjowiryo, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Sumarjo Gatot Irianto, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Donni Azdan, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustiningsih, Bupati Karawang, Ade Swara, dan Bank Dunia, Ilham Abla.

WISMP APL I merupakan salah satu dari program berskala luas dan sangat kompleks dengan melibatkan para pemilik kepentingan yang relatif beragam dari berbagai tingkat seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan lingkungan pemerintah, swasta dan masyarakat. “Tidak mengherankan mengingat skala dan kompleksitas tersebut, banyak sekali kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan WISMP APL I selama ini,” ujar Amron.

Kendaraan reformasi pengelolaan SDA dan irigasi, Program WISMP APL I menunjukkan hasil yang positif, keadaan ini dapat dibuktikan dengan sejumlah hasil yang sudah dicapai dari pelaksanaan program antara lain Perkuatan Insitusi dan Kelembagaan dari target 14 Provinsi, 13 Provinsi sudah berhasil membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi, 9 diantaranya telah memiliki Sekretariat Dewan SDA Provinsi dan dari target 99 Kabupaten, 95 Kabupaten sudah membentuk Komisi Irigasi Kabupaten.

“Sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi dari target 343 ribu ha, telah berhasil dilaksanakan proses pembuatan Desain Partisipatif seluas 478,193 ha. *Progress* tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerjasama antara koordinasi dari seluruh PMU dan PIU mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Untuk itu diharapkan *success story, lesson learned* dari pelaksanaan WISMP APL I dapat dijadikan bahan pijakan dalam melaksanakan WISMP 2,” jelas Amron.

Walaupun kegiatan WISMP-2 secara formal akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012, nyatanya terdapat beberapa provinsi dan kabupaten telah melaksanakan kegiatan WISMP-2 pada tahun 2011 melalui pendanaan APBD murni dalam bentuk *parallel financing*.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bersungguh-sungguh ingin mengembangkan program pengelolaan irigasi partisipatif (PPSIP) yang merupakan amanat dari UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerahnya masing-masing.



Komponen kegiatan WISMP 2 meliputi komponen A Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan institusi koordinasi (Dewan SDA Provinsi dan TKPSDA WS dan institusi pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai (BBWS/BWS dan Balai PSDA) serta meningkatkan kinerja prasarana sungai untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam penyediaan air bagi masyarakat.

Untuk komponen B Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, tujuannya adalah meningkatkan kinerja pelayanan irigasi dan upaya mempertahankan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi di 101 kabupaten pada 14 provinsi di Indonesia.

Komponen C Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Peningkatan Pengelolaannya, tujuannya adalah perbaikan dan modernisasi manajemen sistem irigasi Jatiluhur (melayani 240.000 ha) yang meliputi program pengenalan prinsip Pengelolaan irigasi partisipatif, pembentukan dan perkuatan unit pengelola irigasi partisipatif dan lembaga pemerintahan modernisasi prasarana/infrastruktur irigasi dan drainase.

Dan komponen D Pengelolaan Proyek serta *Technical Assistance*, tujuannya adalah dalam rangka mendukung manajemen program WISMP 2 secara keseluruhan untuk PMU/PIU di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, PMTA, program *monitoring* dan evaluasi, serta untuk kegiatan *Independent Monitoring Evaluation Unit* (IMEU).

Program WISMP 2 dalam hal mekanisme penganggaran dilaksanakan melalui mekanisme penerusan pinjaman pemerintah sebagai hibah kepada pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.07/2008.

Hal ini berarti pemerintah daerah akan menerima hibah dari pemerintah dan dipergunakan untuk melaksanakan program WISMP-2 yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam *project management manual* (PMM) serta diikat dalam naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.



Penandatanganan perjanjian hibah daerah program WISMP-2 merupakan titik awal atau *starting point* bagi pelaksanaan program WISMP 2 di provinsi dan kabupaten, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar *implementing unit* di tingkat pusat dan daerah serta pemahaman terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan program WISMP-2 seperti *Project Implementation Plan* (PIP), *Project Management Manual* (PMM), *Project Administration Document* (PAD), *Loan Agreement* (LA) akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program WISMP-2.

Launching dan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah Program WISMP-2 bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai program WISMP-2 bagi para pengambil keputusan di daerah dengan harapan agar Provinsi dan Kabupaten dapat dengan segera melaksanakan kegiatan WISMP-2 di daerah. *(anj/tin)*



Air Baku Tingkatkan Tampungan Air

Permasalahan dan tantangan pengelolaan sumber daya air di masa depan akan semakin kompleks salah satunya disebabkan oleh pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa yang belum optimal. Dari 7,2 juta ha jaringan irigasi yang terbangun hanya 11% yang ketersediaan airnya dapat dijamin melalui waduk, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (*free intake*), sedangkan 18% atau 1,34 juta ha (kewenangan pusat) mengalami kerusakan terutama terjadi di daerah yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Hal tersebut terungkap dalam paparan yang disampaikan oleh Direktur Bina Program, Mudjiadi, dalam rangka Sinkronisasi Penyiapan Usulan Program Kegiatan Air Baku Tahun 2013, 1 Februari 2012, di Surabaya, Jawa Timur.

Sementara untuk pengembangan rawa sebagai alternatif lahan irigasi baru 5,4% atau 1,8 juta ha yang dikembangkan

dari total potensi seluas 33,4 juta ha. Penurunan fungsi jaringan irigasi dan rawa disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam, kurang optimalnya kegiatan OP, rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* dalam pengelolaan jaringan irigasi.

“Pesatnya pertumbuhan penduduk meningkatkan *demand* penyediaan pangan, sementara di sisi lain luas sawah beririgasi yang beralih fungsi untuk non-pertanian sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan,” jelas Mudjiadi.

Sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian dan untuk berbagai keperluan lainnya. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.

Untuk itu pengelolaan SDA harus memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, hulu dan hilir, pemanfaatan air permukaan

dan air tanah *demand* dan *supply*, serta kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.

Dengan total potensi air Indonesia sebesar 3221 milyar m³, maka pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan ketersediaan air baku bagi domestik, pertanian dan industri secara berkelanjutan serta mengurangi tingkat resiko akibat daya rusak air antara lain ditujukan untuk upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air, pola distribusi sumber daya air dan pola pemanfaatan sumber daya air dan upaya penyediaan air baku untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bagi pemukiman (perkotaan dan domestik), khususnya penyediaan air baku untuk air minum.

“Untuk itu sesuai dengan Perpres No. 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, strategi penyediaan air baku diantaranya dengan meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan air sebagai sumber air baku dan optimalisasi sumber air baku yang ada dengan melakukan operasi dan pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku sejalan dengan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan,” lanjut Mudjiadi.

Mudjiadi mengatakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan air baku, diantaranya adalah penyediaan air baku bersifat regional, adanya aspek keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), desain secara menyeluruh terdiri unit air baku, unit produksi dan unit distribusi, kesiapan lahan yang akan dipakai dan penggunaan *low cost technology* dan *green technology*. (*ech/tin*)





Balai Wilayah Sungai Bali Penida

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok pada 8°03'40"- 8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53"-115°42'40" Bujur Timur dengan luas wilayah 5.636,66 Km², yang terbagi atas 8 (delapan) wilayah Kabupaten dan 1 (satu) wilayah Kota yaitu; Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar dan Kota Denpasar. Pulau Bali juga dikelilingi pulau-pulau kecil yaitu Pulau Menjangan, Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan serta Pulau Serangan.

Provinsi Bali memiliki 165 sungai besar dan kecil, 4 danau alam yaitu Danau Batur: 370Ha, Danau Beratan: 1.607,5 Ha, Danau Tamblingan: 110 Ha dan Danau Buyan: 360 Ha serta sejumlah danau buatan berupa waduk (5 buah) dan Embung (5 buah). Berdasarkan besaran debit air yang dihasilkan, tidak kurang terdapat sejumlah 1.273 mata air yang berasal dari 8 cekungan air tanah.

Wilayah Kerja BWS Bali Penida

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 13/PRT/M/2006 tanggal 17 Juli 2006 Provinsi Bali menjadi satu wilayah kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida yang terbagi dalam 20 Sub Wilayah Sungai, yang berada di 9 Kabupaten dan Kota. Sungai-sungai utama di Wilayah Sungai (WS) Bali-Penida mencakup 165 daerah aliran sungai yang tersebar dari Sub WS 03.01.01-Sub WS 03.01.19, sedangkan untuk Sub WS 03.01.20 terdapat 49 sungai musiman.



TUGAS DAN FUNGSI BWS BALI-PENIDA

BALAI WILAYAH SUNGAI adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui direktur terkait.

TUGAS

Tugas Balai Wilayah Sungai Bali-Penida adalah melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

FUNGSI

- Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai,
- Penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai,
- Pengelolaan sumber daya air pada wilayah air,
- Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai,
- Operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai,
- Pengelolaan sistem hidrologi
- Penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air.
- Memfasilitasi kegiatan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
- Pelaksanaan ketatausahaan Balai Wilayah Sungai

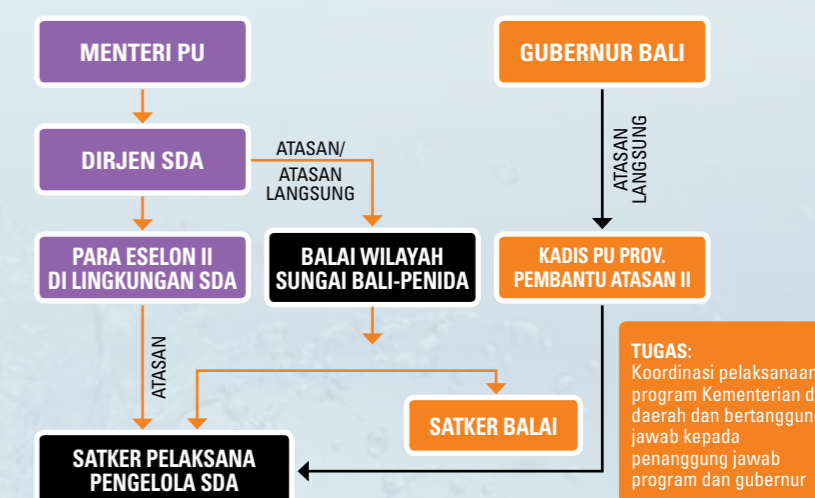
VISI

“Terwujudnya pemanfaatan SDA di Wilayah Sungai Bali-Penida yang lestari, berwawasan lingkungan dan berkesinambungan secara kualitas dan kuantitas bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan Tri Hita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara Manusia dengan Penciptanya (Tuhan Yang Maha Esa), Manusia dengan sesamanya, dan Manusia dengan lingkungannya”.

MISI

- Konservasi sumber daya air yang berkelanjutan;
- Pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kuantitas dan kualitas;
- Pengendalian daya rusak air;
- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air
- Peningkatan keterbukaan (aksesibilitas) dan ketersediaan data serta informasi pengelolaan sumber daya air.

STRUKTUR KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI BALI PENIDA



PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Untuk pengembangan dan konservasi sumber daya air telah dilaksanakan beberapa kegiatan pembuatan bendungan/waduk, embung, *cheddam* konservasi, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sumber air yang ada sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat dan pengguna air lainnya.

Dalam rangka pengendalian banjir dan perbaikan sungai, BWS Bali Penida telah melaksanakan kegiatan normalisasi alur, penguatan tebing dan konsolidasi dam di beberapa sungai di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar untuk wilayah Bali bagian barat. Untuk wilayah Bali bagian utara, BWS Bali Penida melaksanakan normalisasi alur dan penguatan Tebing Tukad Banyumala di Kabupaten Buleleng. Sementara untuk Bali bagian timur di Kabupaten Karangasem BWS Bali Penida melaksanakan normalisasi alur sungai, penguatan tebing serta pembuatan Chek Dam Tukad Banyuning, perbaikan bangunan penguatan tebing di Tukat Mengereng dan Anak Tukat Kelincing.

Berdasarkan analisis citra satelit 2009, Bali memiliki panjang pantai sepanjang 437,70 Km. Dari total panjang pantai tersebut sepanjang

181,70 Km telah mengalami erosi dan baru sepanjang 83,726 Km yang sudah ditangani oleh BWS Bali Penida di tahun 2011. Perubahan yang terjadi merupakan proses alam dalam mencari bentuknya yang stabil dinamis. Proses perubahan ini bertambah cepat akibat berkurangnya *supply* sedimen baik dari arah darat (sungai) maupun laut, perubahan morfologi dan topografi laut baik secara alamiah ataupun perbuatan manusia, hilang atau rusaknya penahan gelombang alami, terumbu karang, batu karang, kerikil, hutan bakau, dan pasir, serta perubahan iklim global (*climate change*).

Kegiatan pengembangan air baku di BWS Bali Penida dilakukan dengan membangun prasarana sistem penyediaan air baku. Salah satunya pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Telagawaja di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.

Bali memiliki areal sawah seluas 161.389 Ha yang terdiri dari areal baku seluas 90.837 Ha dan areal fungsional seluas 70.552 Ha dengan Daerah Irigasi (DI) sebanyak 373 buah. Berdasarkan data BWS Bali Penida, Bali memiliki prasarana irigasi yang terdiri dari jaringan irigasi teknis sepanjang 4.854.073 Km, jaringan primer

sepanjang 852,388 Km, Jaringan Sekunder sepanjang 945.710 Km, Jaringan Tersier sepanjang 3.053.975 Km serta jaringan irigasi non teknis dengan panjang 1.051.136 Km.

Pendayagunaan air tanah oleh BWS Bali Penida dimaksudkan untuk kepentingan irigasi bagi daerah-daerah yang tidak tercakup dalam sistem irigasi atau tidak dapat bercocok tanam sepanjang tahun, misalnya Kecamatan Negara Melaya dan Pekutatan (Kabupaten Jembrana), Kecamatan Grogak dan Tejakula (Kabupaten Buleleng) serta Kecamatan Kubu dan Abang (Kabupaten Karangasem). pendayagunaan air tanah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani lokal dan memperbaiki kesejahteraan petani dengan pencapaian percepatan pembangunan melalui perbaikan, peningkatan dan kegiatan penyediaan sistem irigasi.

Kegiatan tersebut tersebut diformulasikan melalui pendekatan perencanaan partisipatif dengan melibatkan para petani guna meningkatkan ketahanan pangan, mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif serta untuk meningkatkan pendapatan para petani di sekitar lokasi kegiatan.



Pembangunan Bendung Copong Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional

Menurut PP.Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi, dinyatakan bahwa fungsi irigasi adalah untuk mendukung produktivitas pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya kepada para petani. Terlebih lagi untuk mensukseskan program pemerintah Indonesia, dalam mengejar target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 perlu didukung dengan berbagai upaya antara lain peningkatan *supply* air baku untuk pertanian dengan pembangunan bendung.

Dalam kaitan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum-Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah melakukan beberapa langkah strategis antara lain dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Garut yaitu dengan dibangunnya bendung Copong—Daerah Irigasi Leuwigoong oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.

Bendung Copong direncanakan untuk mengairi DI Leuwigoong seluas +5.313 Ha, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi padi melalui rehabilitasi jaringan irigasi terdiri dari bangunan utama, saluran irigasi termasuk bangunan lainnya, dengan tujuan meningkatkan standar hidup petani, penyerapan lapangan kerja sekitar area proyek, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kondisi sosial ekonomi pedesaan.

Diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan bendung Copong ini dapat berjalan sesuai dengan rencana penyelesaian pada tahun 2013.

PEMBANGUNAN BENDUNGAN TITAB

Dalam rangka melaksanakan Program Konservasi Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Bali Penida melaksanakan pembangunan waduk atau bendungan, embung dan bangunan penampung air, salah satu diantaranya adalah pembangunan Bendungan Titab.

Bendungan Titab terletak di Desa Ularan dan Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pembangunan Bendungan Titab dimulai sejak tahun 2010 dan direncanakan selesai pada tahun 2014. Bendungan ini direncanakan memiliki tinggi sebesar 59.80 meter dengan volume tampungan efektif 10.60 x 106 m³ dan volume tampung total 12.79 x 106 m³.

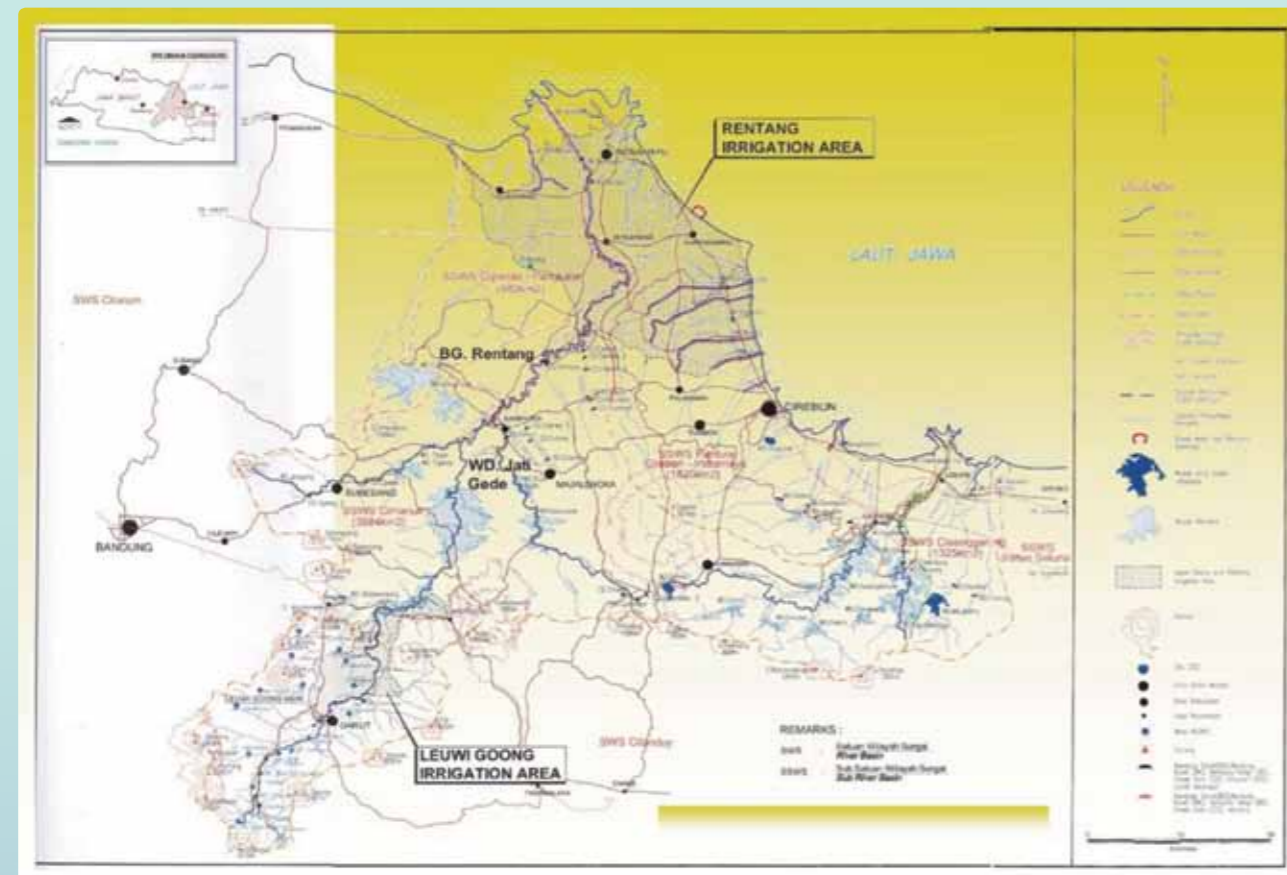
Bendungan titab dibangun untuk memenuhi kebutuhan air irigasi seluas 1.794,82 Ha yang terdiri dari Daerah Irigasi Saba seluas 1.396 Ha dan Daerah Irigasi Puluran seluas 398,42 Ha, meningkatkan intensitas pola tanam dari 169% menjadi 275%, penyediaan air bersih sebesar 359 liter/detik, menghasilkan daya listrik sebesar 3.15 Megawatt serta *Maintenace Flow* sebesar 0.55 m³/detik.



SEJARAH PEMBANGUNAN BENDUNG COPONG

Pembangunan bendung Copong dilatar belakangi bahwa di hulu DI. Leuwigoong yang terdiri dari 11 jaringan irigasi desa, sebagian besar kondisi jaringan yang telah ada dalam kondisi rusak dan tidak dapat dioperasikan, sedangkan di hilir tidak ada sumber air yang dapat diandalkan, sehingga masih merupakan sawah tadah hujan, disamping telah terjadi pendangkalan sungai paska letusan gunung Papandayan tahun 2002.

Bendung Copong terletak di tengah-tengah kota Garut provinsi Jawa Barat berada pada jarak 60 km dari Kota Bandung, dengan letak geografis pada 7°LS-07°12'LS dan 107°52'BT-108°05'BT. Wilayahnya meliputi 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu: Banyuresmi, Leuwigoong, Cibiuk, Karangpawitan, Wanaraja, Sukawening, Cibatu, Garut Kota, dan Malangbong.



Sejarah pembangunan bendung Copong telah dirintis sejak Proyek Induk Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung yang diawali dengan perencanaan pada tahun 1991/1992 dengan kegiatan SID oleh PT. Sarana Bhuana Jaya dan PT. Wirantha Bhuana Raya dengan total area 6.394 ha, selanjutnya pada 1995/1996 ada kegiatan *review design* sistem saluran proyek irigasi Leuwigoong oleh DHV. Dengan biaya dari PTSL-II pada tahun 2005-2006 ada kegiatan *review design* dengan total DI seluas 5.313 ha. Pada saat akhir kegiatan th 2005/2006 dihasilkan dengan pengembangan antara lain sebagai berikut:

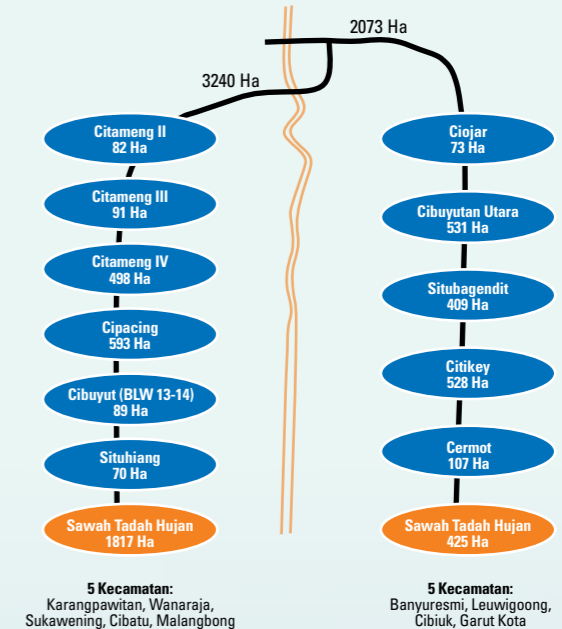
- Pembangunan Bendung Copong
- Pembangunan saluran utama sepanjang 14.922 km
- Pembangunan saluran sekunder sepanjang 29.981 km
- Pembangunan 518 buah bangunan irigasi
- Rehabilitasi/peningkatan saluran utama sepanjang 2.962 km
- Rehabilitasi/peningkatan saluran sekunder sepanjang 69.575 km
- Rehabilitasi/peningkatan 176 bangunan irigasi



Area DI. Leuwigoong terdiri dari sebelah kiri & sebelah kanan. Area sebelah kiri luas area 2.073 ha meliputi kecamatan Banyuresmi, Leuwigoong, Cibiuk dan Garut kota, skema irigasi Ciojar seluas 73 ha, skema irigasi Cibuyutan utara seluas 531 ha, skema irigasi Situ Bagendit seluas 409 ha, skema irigasi Citikey seluas 528 ha, skema irigasi Cermot 107 ha, sawah tadah hujan 425 ha.

Area DI. Leuwigoong sebelah kanan luas area 3.240 ha meliputi kecamatan Karangpawitan, Wanareja, Sukawening, Cibatu dan Malangbong, skema irigasi Citameng II seluas 82 ha, skema irigasi Citameng III seluas 91 ha, skema irigasi Citameng IV 498 ha, skema irigasi Cipacing 593 ha, skema irigasi Cibuyut seluas 89 ha, skema irigasi Situhiang seluas 70 ha, sawah tadah hujan seluas 1.817 ha.

SKEMA PENGEMBANGAN D.I. LEUWIGOONG



DATA TEKNIS BENDUNG COPONG



- Hidrologi:**
 - Luas DAS : 516 km²
 - Hujan tahunan : 1.514 mm
 - Disain debit banjir : 740 m³/det (Q100)
- Bendung:**
 - Tipe bendung : Gerak (barrage)
 - Tipe crest bendung : Ambang lebar
 - Panjang crest bendung
 - Flood way : 3 x 12,5 m
 - Scouring sluice : 1 x 5 m
 - Jarak antar abutment : 50 m
- Tipe settling basin : USBR tipe IV
- Tipe scouring sluice : Double fixed wheel gate
- Bangunan pengambilan**
 - Kapasitas disain : 10,39 m³/detik
 - Pintu (panjang x tinggi) : 3 x 1,3 m, 3 unit
- Kantong lumpur**
 - Debit normal : 8,66 m³/detik
 - Debit flusing : 10,39 m³/detik
 - Panjang : 118 m
 - Lebar : 3 x 10 m
 - Bed slope : 0,008

Diharapkan dengan selesainya pembangunan bendung Copong ini, ada pengembangan pertanian antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas tanam dari 191% menjadi 250%
2. Pola tanam:
 - Awal : Padi – Padi – Palawija
 - Pengembangan : Padi – Padi – Palawija
3. Area tanam:
 - Padi : 10.127 ha/th menjadi 10.626 ha/th
 - Jagung : 0 ha/th menjadi 1.318 ha/th
 - Kedelai : 0 ha/th menjadi 1.318 ha/th
4. Target produksi:
 - Padi : 4,2 ton/ha menjadi 5 ton/ha
 - Jagung : 0 ton/ha menjadi 3,5 ton/ha
 - Kedelai : 0 ton/ha menjadi 2,0 ton/ha
5. Produksi rencana:
 - Padi : 40.506 ton/th menjadi 53.130 ton/th
 - Jagung : 0 ton/th menjadi 4.666 ton/th
 - Kedelai : 0 ton/th menjadi 2.636 ton/th

Dalam rangka pengembangan lahan pertanian tersebut juga dilaksanakan penguatan kelembagaan yaitu pendampingan dalam penguatan kelembagaan termasuk pengidentifikasian: Perda tentang P3A dan GP3A, sosialisasi dan konsultasi publik, pembentukan 18 P3A baru disamping pendampingan 42 P3A dan 5 GP3A yang telah ada.

Dalam mewujudkan kegiatan ini diperlukan pembebasan lahan yang terdiri dari:

1. Bendung dan genangan : 28,83 ha
2. Saluran induk : 38,01 ha
3. Saluran sekunder : 68,79 ha
4. Fasilitas kantor : 1,10 ha
5. Fasilitas OP & jalan masuk : 0,21 ha
6. Total kebutuhan lahan : 136,94 ha

Dan lahan yang sudah bebas terdiri dari :

1. 2002, APBN : 22,69 ha
2. 2002, APBD PROV : 8,55 ha
3. 2004, APBN : 28,11 ha
4. 2005, APBN : 19,92 ha
5. 2009, APBN : 1,28 ha
6. 2009, APBD PROV : 10,85 ha
7. 2009, APBD KAB : 1,33 ha
8. Total Realisasi : 92,73 ha
9. Lahan yang belum bebas : 44,12 ha

MANFAAT BENDUNG COPONG



Diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan bendung Copong ini dapat berjalan sesuai dengan rencana penyelesaian pada tahun 2013, dan dukungan dari semua pihak yang selalu ditunggu baik bersifat teknik maupun non teknik, khususnya dalam pembebasan lahan, permasalahan sosial dan lingkungan.

Ditulis oleh :
Ir. Joko Mulyono, ME
 Kepala Bidang Pelaksanaan
 Jaringan Pemanfaatan Air Balai
 Besar Wilayah Sungai Cimanuk
 Cisanggarung
 Hp. 08161194044,
 PIN BB. 267835AF



Pelaksanaan OP yang Baik Jamin Kelestarian Fungsi dan Infrastruktur SDA



Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan di bidang sumber daya air, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Hartanto, dan Kasubdit Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Agus Setyawan, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah prasarana bidang sumber daya air di Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, 20–21 Desember 2011, di Bali. Kegiatan itu dilaksanakan terkait dengan monitoring dan evaluasi kegiatan OP prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh BWS Bali Penida dan SKPD provinsi Bali. Dan didampingi oleh PPK OP SDA II BWS Bali Penida Drs. I Nengah Swardana, MM dan PPK OP SKPD Pemerintah Provinsi Bali, Ir. Made Nunuk Yuswari.



Salah satu prasarana yang menjadi objek perhatian adalah Daerah Irigasi Kedewatan (luas potensi 3.635 Ha) yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang mencakup Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung dan Kotamadya Denpasar.

Air untuk Daerah Irigasi tersebut diambil dari aliran sungai Ayung dengan Bangunan Bendung Tetap yang dibangun tahun 1928, dan pernah dilakukan rehabilitasi bendung pada tahun 1971, dengan data teknis lebar tubuh bendung 23,30 m, panjang saluran induk 3,902 km, sekunder 63,523 km, debit rata-rata yang dihasilkan dari Bendung sebesar 1,12 l/dt dan terdapat 8 buah bangunan bagi, 56 buah bangunan sadap dan 1 buah bangunan bagi sadap, disamping itu untuk kelancaran tugas operasi dan pemeliharaan juga disiapkan jalan inspeksi sepanjang 1,1 km.

Beberapa Subak yang mendapatkan air dari Bendung tersebut antara lain Subak Anggabaya, Kedua, Saba, Paang, Taman, Tamaga, Poh Manis, Umalayu, Biayung Padanggalak dan Subak Longatad, sementara pola tanam yang dilaksanakan adalah padi-padi palawija (IP : 2.00), dengan rata-rata produksi dapat mencapai 7,2 ton/ha.

Menurut Direktur Bina O & P, Ir. Hartanto, Dipl.HE, dalam menghadapi ketersediaan air yang semakin terbatas dan untuk menjamin kelestarian fungsi dan infrastruktur SDA yang ada perlu diupayakan peningkatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan OP prasarana SDA. Salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah masalah status tanah rumah petugas OP yang belum terurus sertifikatnya, dan secara keseluruhan masalah operasi dan pemeliharaan perlu dukungan dari kabupaten terkait untuk keberlangsungan fungsi Daerah Irigasi. (Agus Setyawan, Kasubdit Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Bina OP)



Pengelolaan SDA Berdasarkan UU SDA



Pengelolaan sumber daya air terpadu (IWRM) adalah proses koordinasi dalam pengembangan, pengelolaan air dan lahan serta sumber daya air lainnya dalam satu wilayah sungai, untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan sosial yang seimbang. Artinya pengelolaan difokuskan antara kepentingan bagian hulu dan hilir sungai, antara kuantitas dan kualitas air, antara air tanah dan air permukaan serta antara sumber daya lahan dan SDA.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal SDA, Moch. Amron dalam acara *Indonesia-Japan Joint Workshop on Integrated Water Resources Management* dengan tema *River Information System & Operation and Maintenance*, 19 Januari 2012, di Jakarta. Turut hadir dalam acara *workshop* tersebut Direktur Bina Program Mudjiadi, Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Hartanto dan perwakilan dari *Senior Representative* JICA Indonesia Office, Ishiguro Jitsuya serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Oeda Shigeta.

Sejak tahun 2004 Indonesia telah mengadopsi konsep terpadu pengelolaan SDA dengan diterbitkannya UU No. 7 tahun 2004 tentang SDA sejalan dengan proses tumbuh desentralisasi dan otonomi daerah. Hukum jelas mengatur tentang pengelolaan SDA berdasarkan DAS, pemisahan kekuasaan pemerintah (pusat, provinsi, kota) dan juga penekanan pada partisipasi dan kemitraan publik dan bisnis dalam pengelolaan SDA.

UU Sumber Daya Air diharapkan membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sumber daya air untuk dikelola secara utuh dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan bagi kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut pengelolaan SDA terpadu berdasarkan 5 pilar yaitu:

1. Konservasi
2. Pendayagunaan
3. Pengendalian daya rusak air
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta
5. Pengembangan sistem informasi SDA

Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Amron mengatakan bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kapasitas lingkungan yang disebabkan oleh pengalihan dalam penggunaan lahan serta mengabaikan tata ruang yang sudah direncanakan sebelumnya. Jika hal ini terus terjadi maka air akan menjadi barang yang langka di muka bumi ini.

“Tentu saja hal tersebut menjadi tugas kita untuk dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu krisis nasional dan dunia akan air yang kini tengah memasuki tahap terpenting,” lanjut Amron.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia berkomitmen untuk dapat melaksanakan MDG's atau *Millenium Development Goals*. “Dengan adanya MDG's akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memiliki persediaan air yang cukup dengan memberikan fasilitasi pembangunan penyediaan air serta perbaikan infrastruktur sungai dan perlindungan pada pantai,” ujar Amron.

Sistem informasi sungai terkait dengan 5 pilar tersebut terutama pada pengembangan dari sistem informasi SDA. Pengembangan sistem akan didukung oleh operasi, manajemen dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sungai.

Melalui *workshop* ini diharapkan Indonesia dan Jepang bisa berbagi pengalaman dan informasi tentang pertukaran bagaimana untuk mengatasi masalah dan mengelola sumber daya air terpadu. “Selain itu, kerjasama antara Indonesia-Jepang akan membaik dalam pengelolaan sumber daya air terpadu,” ujar Amron. (anj)

GLOSSARY

Daerah Aliran Sungai adalah Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan di wilayah tersebut ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.



Mendukung Ketahanan Pangan Dalam *Jakarta Food Security Summit*

Isu ketahanan pangan saat ini menjadi topik pembahasan utama pada forum-forum dunia. Hal ini disebabkan penduduk dunia yang telah mencapai 7 milyar jiwa dan diperkirakan akan meningkat hingga 9 milyar jiwa pada tahun 2045. Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut, diperlukan peningkatan produksi pangan 60% dari kebutuhan saat ini.

Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA mempunyai peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air untuk mengairi persawahan, perkebunan, dan lahan pertanian lainnya. Ini yang mendasari keikutsertaan Direktorat Jenderal SDA dalam Seminar Nasional dan Pameran Pangan, Jakarta Food Security Summit: Feed Indonesia Feed the World tanggal 7-10 Februari 2012 di JCC Senayan, Jakarta.

“Kementerian PU melalui Ditjen SDA berupaya memaksimalkan jaringan irigasi seluas ±7,2 juta Ha dari total 9,4 juta Ha lahan produksi sawah”, ujar Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak mewakili Menteri PU sebagai panelis dalam seminar yang bertemakan Konektivitas dan Infrastruktur dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.





“Jika melihat produksi pertanian yang dilengkapi dengan irigasi teknis, terutama waduk, intensitas tanam petani dapat mencapai 200% atau lebih dari luas lahan pertanian”, tambahnya. Dalam 5 tahun ini, Ditjen SDA telah menambah area jaringan irigasi seluas 500.000 Ha dan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa sehingga dapat memenuhi target 4,5 juta ton/Ha dan upaya surplus 10 juta ton pada tahun 2014.



Sedangkan dalam Pameran Pangan yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kementerian, lembaga, produsen, usaha kecil menengah, maupun koperasi sebanyak 165 peserta, Ditjen SDA secara khusus menginformasikan tentang pemanfaatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan jaringan rawa sebagai sistem pengairan untuk pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui panel-panel informasi dan interaksi dengan para pengunjung. Keikutsertaan Ditjen SDA dalam acara ini juga masuk dalam rangkaian kegiatan Hari Air Dunia 2012 bidang pameran.



Seminar dan pameran yang dibuka oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bekerja sama dengan berbagai instansi Pemerintah, BUMN dan swasta. Seluruh kegiatan dalam acara tersebut dilakukan sejalan dengan program pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (ech)





Tanda Ribuan dan Desimal

Pada suatu pagi di Kota Delft, Belanda, seorang mahasiswa Indonesia berdebat dengan rekan satu timnya dari Amerika karena program simulasi hidrologi mereka menghasilkan informasi yang tidak logis. Setelah seharian meneliti program tersebut didapatkan bahwa kesalahan terjadi akibat hal sepele; bukan pada bahasa pemrograman namun akibat ketidakkonsistenan tanda “.” (titik) dan “,” (koma) dalam penulisan ribuan dan desimal.

Program hidrologi yang dibuat kedua mahasiswa tersebut melakukan kesalahan akibat data yang dimasukkannya bergantian dengan rekan Amerikanya menggunakan sistem yang berbeda. Mahasiswa Indonesia tersebut salah memasukkan data luas daerah aliran sungai akibat terbiasa menggunakan tanda baca titik (.) sebagai pemisah ribuan dan koma (,) sebagai penanda desimal sedangkan orang Amerika menggunakan koma (,) sebagai pembatas ribuan dan titik (.) sebagai pembatas desimal. Ketika data luas tersebut dimasukkan tidak konsisten oleh mahasiswa Indonesia dan Amerika, kesalahan analisa oleh program pun terjadi.

Kesalahan ini walaupun sederhana namun sering merumitkan dan menghabiskan waktu bagi pekerja yang sering bergelut dengan angka dan menggunakan program komputer *spreadsheet* seperti Microsoft Excel. Kerumitan akan muncul jika data yang diterima berasal dari orang asing atau orang Indonesia yang tidak merubah pengaturan pada programnya dan hasil olahan data tersebut akan digunakan untuk kepentingan lintas negara.

REFORMASI BIROKRASI

Sistem penulisan tanda titik sebagai ribuan dan koma sebagai desimal yang saat ini dianut Indonesia sebenarnya tidak lazim dan berbeda dengan standar yang umum digunakan oleh mayoritas bangsa-bangsa. Menurut sistem internasional (standar pengukuran yang diterima secara internasional), penulisan ribuan adalah menggunakan koma sedangkan penulisan desimal menggunakan titik.

Pertanyaan yang menyeruak kemudian adalah dari mana bangsa kita mengadopsi ‘keanehan’ ini? Jawabannya mudah ditebak, dari bangsa Belanda kita mendapatkan sistem ini. Seorang dosen dari Belanda pernah menyatakan bahwa pewarisan sistem ribuan dan desimal mereka kepada negara bekas jajahannya adalah satu diantara dampak negatif kolonialisme Belanda.

Mempertimbangkan kesulitan yang timbul akibat penerapan tanda titik dan koma ini, rasanya kita perlu merubah sistem yang kita gunakan. Hal ini tentu bukan ide yang gampang mengingat kita sudah terbiasa dengan sistem yang ada. Terbayang kerepotan yang besar untuk sosialisasi, merubah buku pelajaran, dan penyesuaian sistem administrasi yang harus dilakukan. Dampaknya terhadap dunia akuntansi dan perbankan juga besar dan akan sangat menyita tenaga dan biaya. Tugas berat dan besar menanti jika kita memutuskan perubahan sistem ribuan dan desimal ke sistem yang umum digunakan seluruh dunia.

Betapapun besar dan beratnya upaya perubahan sistem, pemikiran ini perlu dipertimbangkan karena akan sangat memudahkan dalam pekerjaan, pendidikan, dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di kemudian hari. Ini seperti investasi besar yang hasilnya akan kita nikmati setelahnya. Kita pernah mengalami penyesuaian ejaan pada era 70-an menjadi Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan berhasil melewatinya.

Sebagai analogi adalah perubahan sistem pengukuran oleh Amerika Serikat dan Inggris dari sistem imperial ke sistem metrik. Inggris dan Amerika, kedua bangsa pemimpin di bidang sains dan teknologi, pada mulanya menggunakan sistem imperial dalam pengukuran satuan. Alih-alih menggunakan meter, mereka terbiasa dengan *inchi*, *yard*, dan *foot* untuk menyatakan panjang. Dalam pengukuran massa kedua bangsa tersebut terbiasa dengan *pound* dan *oz* daripada kilogram.

Namun demi mempermudah dalam pergaulan dan perdagangan internasional, kedua negara tersebut mau mengadopsi sistem metrik yang berasal dari Perancis. Peristiwa ini adalah sebuah pengorbanan besar bagi kedua bangsa tersebut mengingat mereka adalah pemimpin dalam bidang sains dan teknologi, terlebih lagi bagi bangsa Inggris mengingat Perancis dianggap sebagai pesaing terberat mereka sejak zaman Napoleon Bonaparte.

Pengalaman perubahan ejaan menjadi EYD dan perubahan sistem pengukuran oleh Amerika Serikat dan Inggris mengajarkan bahwa budaya, yang di dalamnya tercakup ilmu pengetahuan dan bahasa, haruslah dinamis dalam artian berubah sesuai perkembangan zaman. Pertanyaannya adalah, beranikah kita berubah?

Andri Rachmanto Wibowo, ST, MSc.

Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Rawa Wilayah II, Direktorat Irigasi & Rawa

